

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ngawi merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Wilayah ini memiliki kondisi geografis yang bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan dengan luas wilayah sekitar 1.295,98 km². Geografis ini menjadikan Ngawi rentan terhadap berbagai bencana alam, seperti banjir, longsor, dan angin kencang. Terletak di pertemuan antara beberapa sungai besar seperti Sungai Bengawan Solo. Dengan kondisi geografis seperti itu Kabupaten Ngawi memiliki kerentanan terhadap terjadinya bencana alam yang mengakibatkan kerugian baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Selain bencana alam Kabupaten Ngawi memiliki kerentanan pada kesejahteraan sosial. Mengacu pada data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Kabupaten Ngawi pada tahun 2023 yaitu sebesar 904.094 ribu jiwa.[1] Persentase penduduk miskin di Kabupaten Ngawi pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 berjumlah 119.02 ribu jiwa menjadi 121.30 ribu jiwa, angka ini naik sebesar 0,25% menjadi 14,4%.[2]

Pertumbuhan populasi yang stabil namun signifikan di Kabupaten Ngawi, ada kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan infrastruktur dan kapasitas pelayanan sosial. Hal ini tidak hanya berdampak pada kehidupan harian mereka yang rentan, tetapi juga mempengaruhi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan layanan public secara keseluruhan yang meliputi pelayanan masyarakat terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan anak jalanan terlantar. Oleh karena itu, pembangunan gedung shalter mungkin dapat menjadi salah satu solusinya. Pembangunan shalter yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat, termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan fasilitas yang ramah lingkungan, menjadi prioritas utama dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

Shelter ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara atau tempat pembinaan bagi masyarakat PMKS, sehingga dapat memberikan perlindungan dan dukungan yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Pembangunan shalter ini sangat dibutuhkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, karena Kabupaten Ngawi belum memiliki shalter penampungan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota mendasar Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 129/HUK/2008 yang menargetkan 80 % dalam kurun 7 tahun mulai 2008 s/d 2016.[3]

Pembangunan shalter ini diharapkan memberikan bantuan sosial dan pembinaan sosial kepada masyarakat terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan anak jalanan terlantar. Agar dapat melindungi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Di sisi lain, infrastruktur sosial yang ada saat ini tidak lagi cukup untuk menampung kebutuhan yang semakin kompleks dan berkembang. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan gedung shelter dinas sosial di Kabupaten Ngawi menjadi prioritas untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dan keterjangkauan layanan sosial bagi seluruh masyarakat. Hal ini dapat mendukung, mendorong, pemulihan dan kemandirian bagi mereka yang tinggal di sana, sehingga mereka dapat kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

1.2 Maksud dan tujuan

1.2.1 Maksud

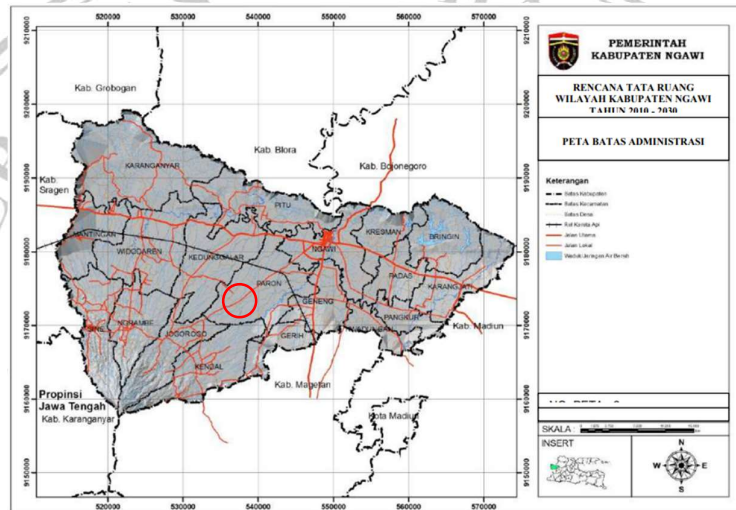
Maksud dari pembangunan shelter dinas sosial adalah untuk menyediakan tempat perlindungan dan bantuan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sesuai dengan standar pelayanan minimal.

1.2.2 Tujuan

Tujuan utamanya adalah untuk memberikan tempat yang aman, fasilitas dasar, layanan kesehatan, dukungan psikososial, dan akses ke layanan sosial lainnya untuk membantu penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) agar terciptanya kesejahteraan sosial.

1.3 Lokasi Pekerjaan

Lokasi yang digunakan untuk proyek pembangunan shelter dinas sosial terletak di daerah Kabupaten Ngawi, persisnya berada di Jl. Suryo No.37, Ngronggi, Grudo, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi. Lokasi ini berada pada pusat kota.



Sumber : RTRW Kab Ngawi Tahun 2010 - 2030

Gambar 1. 1 Lokasi Proyek Pembangunan Shelter Dinas Sosial

1.4 Sasaran

Sasaran kegiatan perencanaan pembangunan shelter dinas sosial dapat meliputi:

1. Tempat penampungan, pembinaan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
2. Mendapatkan desain bangunan shelter yang sesuai dengan standar yang ada. Standar Teknis.

Standar teknis yang digunakan sebagai acuan pembangunan shelter dinas sosial adalah standar yang berpedoman pada standar nasional Indonesia (SNI) sebagai berikut.

1.5 Standar Teknis

1. (SNI-1726-2019) Tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung.
2. (SNI-1727-2020) Tentang Beban Minimum untuk Perencanaan Bangunan Gedung dan Struktur Lain.
3. (SNI-2847-2019) Tentang Tata Cara Perencanaan Beton Untuk Bangunan Gedung.
4. Analisa gedung dengan bantuan software ETABS

1.6 Ruang Lingkup Pekerjaan

Pada proyek Pembangunan shalter dinas sosial Kabupaten Ngawi yang sesuai lingkup Capstone Desain adalah;

1. Pengumpulan Data.
2. Perencanaan konsep pembangunan shalter dinas sosial.
3. Perencanaan struktur atas gedung.
4. Perencanaan struktur bawah gedung.
5. Perencanaan rencana anggaran biaya proyek.

1.7 Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan Proyek Perencanaan Shelter Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Jawa Timur adalah 194 hari kerja.

1.8 Sistematika Penyusunan Laporan

Memaparkan sistematika Laporan kegiatan perencanaan pembangunan yang disusun, meliputi:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara umum tentang latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi pekerjaan, lingkup pekerjaan, uraian kegiatan utama dan sistematika susunan laporan pendahuluan.

Bab 2 Gambaran Umum Lokasi Studi

Bab ini menyajikan lokasi pekerjaan, kondisi topografi, kondisi geologi dan mekanika tanah, hidroklomatologi dan kondisi sosial ekonomi pertanian dan kondisi fisik lokasi pembangunan.

Bab 3 Metode Perencanaan

Bab ini berisi lingkup kegiatan, tahapan pekerjaan, pemilihan teori dasar dan standar yang digunakan, rencana kegiatan analisa, desain, penggambaran.

Bab 4 Program Kerja

Bab ini berisi tentang rincian kegiatan penanganan pekerjaan, tahapan pelaksanaan pekerjaan, struktur dan organisasi pelaksanaan pekerjaan.

Bab 5 Analisa Desain

Dapat disesuaikan dengan lingkup dan TOR pekerjaan perencanaan pembangunan yang didapatkan

Bab 6 Jadwal Pelaksanaan

Bab ini berisi tentang rencana penugasan dan durasi kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada bab ini dipaparkan dan keterlambatan yang telah dan/atau mungkin terjadi.

